

**PERAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
DALAM MELAKSANAKAN PROGRAM
PERPUSTAKAAN BERBASIS INKLUSI SOSIAL**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Untuk memenuhi persyaratan memperoleh

Gelar ahli madya (A.Md.SI.)



Oleh

SURYANI

NIM. 2021B0A003

**PROGRAM STUDI D3 PERPUSTAKAAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
2024**

**PERAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DALAM
MELAKSANAKAN PROGRAM PERPUSTAKAAN BERBASIS
INKLUSI SOSIAL**

Suryani
Universitas Muhammadiyah Mataram

ABSTRAK

Peran perpustakaan bagi kesejahteraan masyarakat dengan berbagai macam latar belakang kehidupan, baik dari segi sosial, ekonomi, budaya, pendidikan hingga spiritual sangatlah penting untuk di perhatikan. Kondisi saat ini kita dihadapkan pada persoalan kesenjangan kualitas hidup masyarakat yang sangat tinggi, dengan adanya kesenjangan ini mengakibatkan tidak meratanya penyebaran informasi disebabkan karena ada gap di lingkungan sosial hingga pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, serta untuk mengetahui pelaksanaan replikasi perpustakaan yang ada di Nusa Tenggara Barat.

Pada penelitian ini Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif. sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan data sekunder dari jurnal ilmiah, buku, artikel serta Teknik pengumpulan data dengan wawancara, dokumentasi dan observasi.

Hasil penelitian yang didapatkan bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Nusa Tenggara Barat berperan dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial dengan cara perpustakaan menjadi pembina bagi perpustakaan yang ada di bawahnya, menjadi Fasilitator, membentuk Tim sinergi, serta perpustakaan berperan dari segi kebijakan dengan mengeluarkan peraturan tentang program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, selain itu perpustakaan juga melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga yang terkait di dalamnya. Selain itu dalam pelaksanaan replikasi perpustakaan, perpustakaan provinsi sudah melakukan replikasi secara mandiri di 21 perpustakaan Desa/Kelurahan.

Dengan berjalannya program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini perpustakaan memberikan peluang yang besar kepada Masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan melalui berbagai macam kegiatan sehingga perpustakaan bukan lagi dinilai hanya tempat membaca atau mengerjakan tugas tapi perpustakaan juga berperan memberikan wadah untuk berkembang.

Kata Kunci: Perpustakaan, informasi, inklusi sosial

**THE ROLE OF THE REGIONAL LIBRARY AND ARCHIVES OFFICE OF
WEST NUSA TENGGARA PROVINCE IN IMPLEMENTING A SOCIAL
INCLUSION-BASED LIBRARY PROGRAM**

Suryani

University of Muhammadiyah Mataram

ABSTRACT

The vital role of libraries in the wellness of individuals from many life origins, encompassing social, economic, cultural, educational, and spiritual dimensions, warrants careful consideration. It is currently confronted with a significant disparity in the community's quality of life, which leads to an unequal distribution of information stemming from deficiencies in the social context regarding education. This study aims to ascertain the function of the Regional Library and Archives Office of West Nusa Tenggara Province in executing a social inclusion-oriented library program and the replication of library initiatives in West Nusa Tenggara. This study employs descriptive qualitative research methodology. This study utilized primary data from interviews and secondary data from scholarly journals, books, articles, and data collection methods including interviews, documentation, and observation.

The results of the research show that the West Nusa Tenggara Regional Library and Archives Office plays a role in implementing a social inclusion-based library program utilizing the library, becoming a coach for the libraries under it, becoming a facilitator, forming a team synergy, and the library plays a role in terms of policy by issuing regulations on social inclusion-based library transformation programs, besides that the library also collaborates with various institutions involved in it. In addition, in the implementation of library replication, the provincial library has replicated independently in 21 village libraries.

With the running of this social inclusion-based library program, the library provides an excellent opportunity for the community to improve the quality of life of library users through various activities so that the library is no longer considered just a place to read or do assignments. Still, the library also plays a role in providing a place to develop.

Keywords: *Library, information, social inclusion*

**MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____**

**KEPALA
UPT P3B**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak masyarakat belum paham fungsi keberadaan perpustakaan sehingga belum tercapai tujuan adanya perpustakaan yang merupakan representasi dari pembelajaran sepanjang hayat. Tujuan perpustakaan adalah untuk melayani semua lapisan masyarakat akan kebutuhan informasi tanpa membedakan strata sosial yang ada di masyarakat, sehingga masyarakat tidak merasa dibedakan dan diberikan hak yang sama dalam mendapatkan informasi (Yusuf, 1988). Di sisi lain Kemajuan sistem teknologi, informasi dan komunikasi sangat membawa peran besar dalam pemerataan akses informasi, memudahkan pengguna untuk mengakses informasi yang dibutuhkan. Faktor kemajuan tersebut membuat sebagian masyarakat belum memahami cara memanfaatkan perpustakaan, menjadikan keberadaan perpustakaan semakin tidak optimal perannya untuk menjawab kegelisahan masyarakat akan pentingnya akses informasi dan ilmu pengetahuan (Nashihuddin, 2021). Selain itu cepatnya pertumbuhan data yang tidak teratur di dalam dunia internet membuat masalah serius yang terkait dengan ketepatan dan keakuratan` penelusuran informasi (Rao, 2011).

Kebutuhan informasi masyarakat sangat beragam selaras dengan latar belakang kehidupan mereka. baik dari latar belakang pendidikan, ekonomi, sosial, profesi, agama, suku, ras dan lain-lain. Di NTB jumlah penduduk yang tercatat oleh Badan Pusat Statistik NTB, pada tahun 2020 sebanyak 5.320.092 jiwa (Badan Pusat Statistik NTB, 2020). Adapun dari segi pendidikan, tidak semua

masyarakat NTB mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. tercatat sebanyak 2.500 siswa putus sekolah serta 12,86 % penduduk buta huruf yang di data oleh dinas pendidikan dan kebudayaan NTB (Suara NTB 2023).

Dari data-data tersebut, Perpustakaan umum khususnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki peran yang sangat penting dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial sehingga kesenjangan akses informasi dapat menurun dan semua kalangan dapat mengakses informasi yang merata, berupa penyediaan koleksi tercetak maupun digital Sebagaimana makna dari Akses informasi yang merupakan kemudahan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan (Rahma, 2018). Dalam pemerataan akses informasi, perpustakaan dan kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Barat harus berupaya melakukan peningkatan layanan dengan program-program yang mencanangkan pemerataan yang berbasis inklusi sosial. Selaras dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reza Mahdi pada tahun 2020 dari hasil penelitian ini dapatkan bahwa perpustakaan berbasis inklusi sosial sangat cocok untuk diterapkan di perpustakaan umum yang merupakan lembaga informasi dan sarana pembelajaran sepanjang hayat bagi seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan dan latar belakang yang ada (Mahdi, 2020).

Saat ini perpustakaan harus terus melakukan peningkatan, salah satu caranya yaitu dengan menerapkan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial. Perpustakaan yang berbasis inklusi sosial dapat dimaknai sebagai perpustakaan yang memberikan berbagai jenis layanan perpustakaan secara terbuka kepada seluruh masyarakat Tanpa membedakan strata sosial yang melekat pada diri masyarakat, sehingga

kesetaraan informasi dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Utami&Prasetyo, 2020). Perpustakaan perlu melakukan transformasi guna menghadapi berbagai macam tuntutan dan kebutuhan masyarakat untuk tetap sejahtera melalui program-programnya. Sehingga mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah. Salah satu contoh nyata yang bisa kita jadikan rujukan adalah Perpustakaan Desa Manuk, salah satu desa yang berada di Jawa Timur, dalam sebuah artikel yang di terbitkan pada tahun 2021 di peroleh data bahwa dampak transformasi perpustakaan desa berbasis inklusi sosial di Desa Manuk Kecamatan Siman menjadi sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat, sebagai pusat solusi dalam mengatasi berbagai probematika kehidupan masyarakat, sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan minat dan bakat masyarakat dengan dibuktikan adanya peningkatan literasi teknologi dan informasi (Wulansari, et al, 2021).

Dalam melaksanakan program berbasis inklusi sosial, perpustakaan mengadakan berbagai macam kegiatan yang menunjang keberlanjutan perpustakaan seperti salah satu contohnya adalah mealui program replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di provinsi, kabupaten/kota sampai pada desa/kelurahan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Widia Astuti pada tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan Belum mandiri dalam melaksanakan program dan bekerja sama dengan perpustakaan Provinsi NTB dalam program replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di lima kelurahan kota mataram yang terdiri dari kelurahan pajeruk, kelurahan ampenan timur, kelurahan mataram, kelurahan dayen peken dan kelurahan dasan cermen (Astuti, 2023). Melalui

program replikasi mandiri maupun nasional perpustakaan akan tetap melaksanakan program perpustakaan yang berbasis inklusi sosial.

Dalam Buku Pedoman Replikasi Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial memberikan makna bahwa replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan proses menduplikasi program untuk meningkatkan peran dan fungsi perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana sepanjang hayat sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Dari berita online NTB satu data, didapatkan ada lima (5) kabupaten/kota di NTB pada tahun 2018-2022 yang merupakan replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di antaranya kabupaten Lombok Timur, kabupaten Lombok Utara, kabupaten Bima, kabupaten Sumbawa barat, kabupaten Lombok Tengah (NTB Satu Data, 2022). Dari data tersebut kita simpulkan belum menyeluruhnya jumlah kabupaten/kota maupun desa dalam replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, sehingga mengakibatkan tidak meratanya penyebaran informasi di NTB melalui buku-buku fisik maupun digital yang disediakan oleh perpustakaan. yang mana dari program ini seharusnya menjadi tempat yang sangat strategis untuk pemerataan akses informasi.

Dengan terlaksananya program Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dari tingkatan bawah sampai tingkatan nasional maka program ini berdampak pada kesiapan masyarakat Indonesia dalam mendukung penuh pembangunan berkelanjutan 2030 yaitu SDG's (*Sustainable Development Programs*) yang merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat yang mencakup 17 tujuan dan sasaran global.

Dengan sistem berkelanjutan maka perpustakaan dapat membantu mencapai seluruh tujuan SDG's dan membuka akses seluas-luasnya terhadap informasi yang sesuai dengan pesan IFLA 2018 yang menyatakan bahwa perpustakaan Dapat mendukung semua indikator SDG's yaitu di antaranya tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi layak, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, ekosistem daratan, perdamaian, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Dari keseluruhan indikator tersebut perpustakaan mengambil peranan penting dalam mendukung keberhasilan SDHG's sehingga tujuan dan harapan negara bisa tercapai.

Dari beberapa penelitian terdahulu serta data-data tentang replikasi perpustakaan berbasis inklusi sosial terlihat bahwa seberapa pentingnya perpustakaan melakukan berbagai peningkatan baik dari peningkatan perannya melalui pelayanan dan program-program yang di canangkan seperti program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial dalam membantu masyarakat keluar dari kesenjangan informasi serta dapat mensejahterakan masyarakat. maka peneliti semakin yakin untuk meneliti peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Dalam melaksanakan program perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial melalui program replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Nusa Tenggara Barat.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dan bercermin dari permasalahan beberapa peneliti terdahulu, maka permasalahan yang ingin di teliti dalam penelitian ini adalah:

1. bagaimana peran dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial?
2. bagaimana pelaksanaan kegiatan replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Nusa Tenggara Barat?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Peran Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial
2. Untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan replikasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial di Nusa Tenggara Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Pada hakikatnya penelitian dilakukan untuk mendapatkan suatu manfaat, adapun manfaat dapat diperoleh dari penelitian tentang peran dinas perpustakaan dan kearsipan daerah provinsi nusa tenggara barat

1) **Manfaat teoritis**

- (1) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan kaitannya dengan peran perpustakaan dalam melaksanakan program perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- (2) Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk peningkatan pengelolaan, pelayanan serta promosi perpustakaan guna meningkatkan pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial
- (3) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di dalam ilmu perpustakaan.
- (4) Sebagai bahan alternatif untuk meningkatkan motivasi dan prestasi belajar dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

2) **Manfaat praktis**

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat membantu menyumbangkan pemikiran bagi berbagai pihak sebagai berikut:

(1) Bagi instansi

Bagi bahan pertimbangan terhadap peningkatan kinerja perpustakaan dalam memenuhi perannya sebagai lembaga dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial.

(2) Bagi peneliti

Menambah wawasan pengetahuan mengenai pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial, dan sebagai salah satu cara untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah di pelajari selama di bangku perkuliahan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah salah satu program kerja yang mengarah pada peningkatan kualitas masyarakat dengan peranan perpustakaan yang semakin kompleks dan berkelanjutan dibandingkan dengan perpustakaan konvensional sehingga keberadaan perpustakaan menjadi wahana belajar sepanjang hidup. Program ini diharapkan dapat berkelanjutan dari Tingkat nasional sampai pada Tingkat perpustakaan Desa/Kelurahan. Perpustakaan sudah seharusnya mampu menjadi tempat pengembangan kualitas literasi Masyarakat dan menjadi tempat berkegiatan Masyarakat melalui berbagai macam kegiatan bimbingan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas hidup pengguna perpustakaan.

- 1) Peran dinas perpustakaan dan kearsipan Daerah Nusa Tenggara barat dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini ialah menjadi fasilitator dengan membentuk tim sinergi yang mana tim sinergi ini bertugas memberikan pembinaan, menyediakan pelatihan, menerbitkan regulasi, melakukan advokasi dengan stakeholder terkait, melakukan sosialisasi, mereplikasi serta mempublikasikan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

- 2) Dalam pelaksanaan kegiatan replikasi perpustakaan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial, perpustakaan provinsi melakukan beberapa kegiatan seperti peer learning meeting Tingkat Provinsi, Stakeholder Meeting Tingkat Provinsi, mereplikasi mandiri. Perpustakaan provinsi mereplikasi 21 perpustakaan.

Dalam proses pelaksanaan program tersebut tentu ada kendala atau hambatan yang dihadapi seperti kurangnya anggaran, SDM yang masih rendah, kurangnya koordinasi kegiatan, serta kurang antusiasme nya Masyarakat.

5.2 saran

Dari hasil penelitian dan data-data yang di peroleh di lapangan, penelitian ini pada dasarnya berjalan sangat baik dan tidak adanya kendala dari segi jarak dan semacamnya, namun dalam penelitian ini tentu ada yang ingin peneliti paparkan beberapa saran dan semoga mendatangkan manfaat bagi kemajuan pendidikan pada umumnya adapun sarannya adalah hendaknya pada penelitian selanjutnya dapat memperdalam Kembali mengenai peran perpustakaan terhadap program perpustakaan berbasis inklusi sosial. Untuk peneliti ataupun penelitian selanjutnya hendaknya meneliti lebih luas dalam mengembangkan ruang lingkup penelitian. Dalam penelitian ini belum sepenuhnya menggambarkan secara keseluruhan tentang peran perprustakaan provinsi NTB dalam pelaksanaan program perpustakaan berbasi inklusi sosial.